

ANALISIS FLYPAPER EFFECT PADA BELANJA DAERAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nurdiah Anjas Kesuma¹, Kartika Rachma Sari¹, Darul Amri¹, Masnoni²

¹ Jurusan Akuntansi, Prodi Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya

² Fakultas Ekonomi, Universitas Sjakhyakirti

Email: nurdiahanjaskesuma@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah, melihat apakah terdapat Flypaper Effect terhadap Belanja Daerah, dan implikasinya terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota. Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Populasi penelitian ini adalah LRA di 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015-2019 dengan menggunakan metode sampling jenuh dan 85 satuan pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. dan PAD, DAU, dan DAK secara bersamaan berpengaruh terhadap Belanja Daerah, PAD, DAU, DAK, dan Belanja Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Selanjutnya terjadinya Flypaper Effect terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Flypaper Effect, Kemandirian Keuangan Daerah

Abstrack

This study aims to examine the effect of Regional Original Income (PAD), General Allocation Funds (DAU), and Special Allocation Funds (DAK) on Regional Expenditures, see if there is a Flypaper Effect on Regional Expenditures, and its implications for the Level of Regency/City Regional Financial Independence. in South Sumatra Province in 2015-2019. The data used in this study is the Budget Realization Report (LRA) in the District / City Government Financial Statements of South Sumatra Province. The population of this research is LRA in 17 regencies/cities in South Sumatra Province for the 2015-2019 Fiscal Year using the saturated sampling method and 85 units of observation. The results show that PAD has a significant effect on Regional Expenditures, DAU have a significant effect on Regional Expenditures, DAK have no and no significant effect on Regional Expenditures, PAD, DAU, and DAK simultaneously have an effect on Regional Expenditures, PAD, DAU, DAK, and Regional Expenditures affect the Level of Regional Financial Independence, and the occurrence of the Flypaper Effect on Regional Expenditures in the Regency/City of South Sumatra Province.

Keywords: Regional Original Income, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Regional Expenditures, Flypaper Effects, Regional Financial Independence.

1. PENDAHULUAN

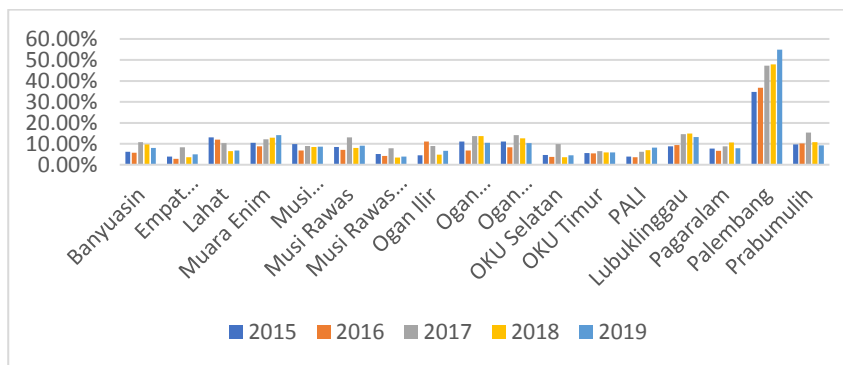
Pemerintah daerah tidak hanya mengatur dan mengelola urusan rumah tangga atau non-keuangan saja, tetapi mengatur dan merencanakan urusan keuangan daerah serta alokasi dana yang diperoleh dari pemerintah pusat maupun daerah itu sendiri dengan dibantu oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Secara tidak langsung masyarakat juga terlibat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mana pemerintah daerah bersama dengan DPRD membuat Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menentukan gambaran jangka pendek dan jangka panjang yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menghadapi desentralisasi fiskal yang memiliki tujuan mensejahterahkan masyarakat dengan memaksimalkan alokasi belanja daerah sebaik mungkin untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitas publik.

Pengaruh dari kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (otonomi daerah) adalah pemerintah daerah diwajibkan menggali potensi yang ada pada daerah itu sendiri baik dari sumber daya alam maupun dari sumber daya manusia. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan daerah dan sebagai sumber penerimaan agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari pelayanan publik dan akan berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih baik (*good government*). Selain mengandalkan penerimaan yang didapat dari daerah itu sendiri, pemerintah daerah juga mendapatkan dana rutin atau disebut juga pendapatan transfer. Pendapatan transfer tersebut didapatkan oleh daerah secara rutin setiap tahunnya sehingga pada laporan keuangan daerah terdapat pos/akun yaitu Pendapatan Transfer. Pada hakikatnya pendapatan transfer terbagi lagi menjadi beberapa bentuk, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kedua dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Melalui dana tersebut, pemerintah pusat berekspektasi agar pemerintah daerah dapat meningkatkan belanja publik namun juga sejalan dengan peningkatan pendapatan daerah.

Permasalahan yang muncul sebagai akibat dari dana transfer berupa DAU dan DAK yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terletak pada perbedaan pemahaman dari fungsi DAU dan DAK yang diberikan tersebut. Pemerintah pusat memberikan dana tersebut sebagai bentuk upaya pemerataan keuangan antar daerah. Dana yang diterima oleh satu daerah dengan daerah lainnya berbeda jumlahnya. Jumlah dari dana transfer ini sesuai dengan hasil pertimbangan melalui beberapa indikator yang telah ditinjau terlebih dahulu dari setiap daerah seperti potensi daerah misalnya. Tujuan lainnya adalah agar pemerintah daerah mampu membangun daerahnya dengan adanya dana tersebut. Sedangkan disisi lain, pemerintah daerah menganggap bahwa dana yang diberikan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Hal tersebut berdampak pada terjadinya respon belanja daerah yang lebih banyak menggunakan dana dari pusat daripada menggunakan pendapatan asli daerahnya sendiri. Fenomena seperti ini dinamakan atau dikenal dengan istilah *flypaper effect* (Susanti dan Indrian, 2017). Selanjutnya, *flypaper effect* akan berpengaruh terhadap aspek lainnya.

Tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai keperluan daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan (rasio) antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total dari pendapatan transfer. Secara singkat dapat dikatakan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah merupakan tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat dari segi keuangan. Rasio kemandirian keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2019 dapat dilihat melalui grafik berikut.



Sumber: BPK RI, Data diolah 2021

Tingkat kemandirian keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah PAD yang masih relatif rendah dibandingkan dengan jumlah pendapatan transfer yang diberikan pemerintah. Disamping itu, Kabupaten/Kota selama lima tahun terakhir dalam kemampuan keuangannya dapat dikatakan cukup rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan latar belakang di atas, diyakikan bahwa terdapat hubungan yang erat antara fenomena *flypaper effect* fenomena *flypaper effect* yang dilihat dari segi belanja daerah yang selanjutnya berdampak terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah itu sendiri. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kondisi terkait pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dengan acuan laporan keuangan tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Lebih lanjut lagi, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa saran yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah setempat untuk melakukan perbaikan di daerahnya agar dapat menjadi lebih baik lagi.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan asosiatif kausal dengan metode kuantitatif. Asosiatif kausal merupakan penelitian yang menggambarkan hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen (Sugiyono, 2020:66). Penelitian ini akan menggambarkan hubungan antara variabel X (PAD, DAU, dan DAK) terhadap variabel Y_1 (Belanja Daerah) yang kemudian mempengaruhi variabel Y_2 (Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah).

2.2 Variabel Penelitian

Variabel penelitian bertujuan untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut dan kemudian ditarik kesimpulan. Variabel penelitian terdiri dari variabel independen dan variabel dependen (Sugiyono, 2020:69). Berikut adalah rincian dari variabel independen dan variabel dependen pada penelitian ini beserta faktor yang menjadi titik ukur (pengukuran) variabel tersebut dan skala yang digunakan. Seluruhnya dirangkum dalam tabel 1 operasionalisasi variabel berikut:

Tabel 1. Operasional Variabel

No	Variabel	Pengukuran	Skala
1	Pendapatan Asli Daerah (X_1)	Realisasi penerimaan PAD pada LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019	Rasio
2	Dana Alokasi Umum (X_2)	Realisasi penerimaan DAU pada LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan 2015-2019	Rasio
3	Dana Alokasi Khusus (X_3)	Realisasi penerimaan DAK pada LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2019.	Rasio
4	Belanja Daerah (Y_1)	Realisasi Belanja Daerah pada LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2019.	Rasio
5	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y_2)	Ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan total Pendapatan Transfer.	Rasio

Sumber: Data diolah 2021

2.3 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD pada 17 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 13 kabupaten dan 4 kota tahun anggaran 2015-2019. Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh atau yang disebut dengan penentuan sampel diambil dari seluruh populasi yang ada yaitu 17 kabupaten/kota. Teknik *sampling* ini biasanya digunakan untuk populasi yang jumlahnya kurang dari 100. Tujuan digunakannya *sampling* ini adalah agar hasil penelitian menjadi lebih akurat. Berikut adalah populasi dan sampel pada penelitian ini:

Tabel 2. Populasi dan Sampel

No	Identifikasi	Jumlah Pemerintah Daerah
1.	Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang disajikan secara lengkap dan telah di audit BPK periode 5 tahun (2015-2019)	17
2.	Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang dijadikan sampel	17
3.	Tahun penelitian	5
	Jumlah Unit Pengamatan (17 x 5 Tahun)	85

Sumber: Data diolah 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah 85. Jumlah tersebut didapatkan dari 17 populasi.

2.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu analisis regresi linier berganda dan analisis statistik (statistik deskriptif). Data yang telah dikumpulkan akan diolah melalui *software Econometric Views (Eviews)* versi 10 untuk mempermudah analisis dan uji hipotesis yang diajukan. Sebelum melakukan uji regresi linier berganda, maka akan dilakukan pemilihan model data panel dan uji asumsi klasik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Pemilihan Model Data Panel

Pemilihan model data panel dilakukan untuk menentukan model yang cocok untuk digunakan pada penelitian ini. Berikut adalah pemilihan model data panel:

1. F Test (Chow Test)

Uji ini dilakukan untuk membandingkan model mana yang terbaik antara *Common Effect* dan *Fixed Effect*. Uji F test ini dilihat melalui nilai *probability F* dan *Chi-Square* dengan asumsi:

- Bila nilai *probability F* dan *Chi-Square* $> \alpha = 5\%$, maka uji regresi panel data yang tepat menggunakan *Common Effect*.
- Bila nilai *probability F* dan *Chi-Square* $< \alpha = 5\%$, maka uji regresi panel data yang tepat menggunakan *Fixed Effect*.

Berdasarkan hasil Chow Test, diperoleh nilai probabilitas *Cross-section Chi-Square* sebesar 0.0000 yang artinya $< \text{nilai } \alpha = 0,05$ maka model yang tepat adalah *Fixed Effect Model*.

2. Hausman Test

Uji ini dilakukan untuk membandingkan model mana yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel antara *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Uji Hausman test ini dilihat melalui nilai *probability F* dan *Chi-Square* dengan asumsi:

- Bila nilai *probability F* dan *Chi-Square* $> \alpha = 5\%$, maka uji regresi panel data yang tepat menggunakan *Random Effect*.
- Bila nilai *probability F* dan *Chi-Square* $< \alpha = 5\%$, maka uji regresi panel data yang tepat menggunakan *Fixed Effect*.

Hasil Hausman Test, diperoleh nilai probabilitas *Cross-section random* sebesar 0.0000 yang artinya $< \text{nilai } \alpha = 0,05$ maka model yang tepat adalah *Fixed Effect Model*. Dari pengujian yang telah dilakukan, penggunaan *Fixed Effect Model* telah terpilih 2 (dua) kali yaitu pada *Chow Test* dan *Hausman Test*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari ketiga model (*Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*), penggunaan model yang terbaik adalah *Fixed Effect Model* dalam menginterpretasikan regresi data panel penelitian.

3.1.2 Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas diperoleh nilai Jarque-Bera sebesar 1.299401 dan nilai *probability (P-value)* sebesar 0.460500. Artinya nilai nilai *probability (P-value)* lebih besar dari α ($0.460500 > 0.05$), maka H_0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Data yang berdistribusi normal layak untuk diolah ke uji selanjutnya. Hasil uji multikolinearitas diperoleh bahwa nilai VIF antar variabel independen pada kolom *Centered VIF* memiliki nilai di bawah angka 10 yang artinya dapat dikatakan tidak terjadinya multikolinearitas pada setiap variabel independen. Data yang tidak terjadinya multikolinearitas layak untuk diolah ke uji selanjutnya. Hasil uji autokorelasi dengan *Langrange Multiplier Test (LM)* diperoleh nilai *probability Obs*R-Squared* sebesar 6.014781. Artinya nilai *probability Obs*R-Squared* lebih besar dari α ($6.014781 > 0.05$), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Hasil uji heteroskedastisitas dengan metode uji ARCH diperoleh nilai *probability (P-value)* sebesar 0.8752. Artinya nilai *probability (P-value)* lebih besar dari α ($0.8752 > 0.05$), maka H_0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.1.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berikut ini merupakan hasil uji dari koefisien determinasi atau *R square*.

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dependent Variable: Y1			
Method: Panel Least Squares			
Date: 08/03/21 Time: 15:15			
Sample: 2015 2019			
Periods included: 5			
Cross-sections included: 17			
Total panel (balanced) observations: 85			
Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.949067	Mean dependent var	27.87576
Adjusted R-squared	0.934178	S.D. dependent var	0.450345
S.E. of regression	0.115539	Akaike info criterion	-1.276089
Sum squared resid	0.867706	Schwarz criterion	-0.701347
Log likelihood	74.23376	Hannan-Quinn criter.	-1.044911
F-statistic	63.74608	Durbin-Watson stat	1.970103
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data diolah dengan Eviews 10 (2021)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui nilai *R-Squared* sebesar 0.949067. Artinya persentase sumbangan pengaruh variabel PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Daerah sebesar 94,9%, sedangkan sisanya sebesar 5,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

Hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui nilai *R-Squared* sebesar 0.957521. Artinya persentase sumbangan pengaruh variabel PAD, DAU, DAK, dan Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 95,7%, sedangkan sisanya sebesar 4,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini, uji hipotesis dilakukan dengan dua cara, yaitu secara parsial dengan uji-t dan secara simultan dengan uji-F. Uji-F dilakukan untuk melihat pengaruh setiap variabel independent terhadap variabel dependen pada penelitian ini secara bersamaan atau simultan. Berikut adalah hasil uji-F pada penelitian ini:

Tabel 4. Hasil Uji F-Simultan

Dependent Variable: Y1			
Method: Panel Least Squares			
Date: 08/03/21 Time: 15:15			
Sample: 2015 2019			
Periods included: 5			
Cross-sections included: 17			
Total panel (balanced) observations: 85			
Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.949067	Mean dependent var	27.87576
Adjusted R-squared	0.934178	S.D. dependent var	0.450345
S.E. of regression	0.115539	Akaike info criterion	-1.276089
Sum squared resid	0.867706	Schwarz criterion	-0.701347
Log likelihood	74.23376	Hannan-Quinn criter.	-1.044911
F-statistic	63.74608	Durbin-Watson stat	1.970103
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data diolah dengan Eviews 10 (2021)

Dependent Variable: Y2			
Method: Panel Least Squares			
Date: 08/03/21 Time: 15:17			
Sample: 2015 2019			
Periods included: 5			
Cross-sections included: 17			
Total panel (balanced) observations: 85			
Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.957521	Mean dependent var	10.45929
Adjusted R-squared	0.944246	S.D. dependent var	9.246756
S.E. of regression	2.183366	Akaike info criterion	4.609962
Sum squared resid	305.0937	Schwarz criterion	5.213441
Log likelihood	-174.9234	Hannan-Quinn criter.	4.852698
F-statistic	72.13120	Durbin-Watson stat	0.874260
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data diolah dengan Eviews 10 (2021)

Uji-t dilakukan untuk melihat pengaruh setiap variabel independent terhadap variabel dependen pada penelitian ini. Berikut merupakan hasil dari uji-t:

Tabel 5. Hasil Uji – t

Dependent Variable: Y1 Method: Panel Least Squares Date: 08/03/21 Time: 15:15 Sample: 2015 2019 Periods included: 5 Cross-sections included: 17 Total panel (balanced) observations: 85				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.810386	4.953436	1.980521	0.0519
X1	0.192995	0.048625	3.969033	0.0002
X2	0.506505	0.202389	2.502628	0.0149
X3	-0.020727	0.032062	-0.646463	0.5203

Sumber : Data diolah dengan Eviews 10 (2021)

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah (H_1)

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh untuk variabel PAD, didapat nilai t-tabel sebesar 1.98969/-1.98969 (lihat pada tabel statistik) dan t-hitung sebesar 3.969033. Karena nilai t-hitung > t-tabel ($3.969033 > 1.98969$) maka **H_1 diterima**. Nilai signifikan variabel PAD sebesar 0.0002 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0.05. Artinya PAD secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa naik atau turunnya PAD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan akan mempengaruhi belanja daerah.

Penerimaan PAD di Provinsi Sumatera Selatan yang paling rendah terdapat pada Kabupaten PALI tahun 2015, yaitu sebesar Rp22.025.377.405. Sedangkan penerimaan PAD yang paling tinggi terdapat pada Kota Palembang tahun 2017, yaitu sebesar Rp1.091.704.605.854. Kabupaten Musi Banyuasin dan OKU Timur memiliki PAD yang cenderung stabil dan meningkat setiap tahunnya.

Pengaruh PAD yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan membuktikan bahwa, pemerintah daerah mampu menggali potensi yang ada pada daerahnya untuk memperoleh pendapatan dalam membiayai kebutuhan daerah. Salah satu faktor pada peningkatan PAD yang didapat daerah adalah pajak daerah. Selain menjadi komponen penyumbang terbesar di APBD, pajak daerah juga menjadi sumber pendapatan yang terbesar di hampir seluruh kabupaten/kota. Peningkatan PAD yang terjadi pada daerah tak lepas dari peran masyarakat yang ikut andil di dalamnya. Hal tersebut dikarenakan masyarakat memiliki kewajiban untuk membayar iuran (pajak) kepada daerah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Contoh dari pajak daerah itu sendiri adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak reklame.

Pengalokasian PAD yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga menjadi faktor lain dalam peningkatan PAD. Pengalokasian PAD yang tepat akan berdampak pada peningkatan kualitas sarana prasarana dan pelayanan publik. Dalam kasus ini, pemerintah daerah dituntut mampu menyusun skala prioritas pembangunan daerah. Pada umumnya, setiap daerah bercita-cita untuk menjadi daerah yang tergolong maju sehingga hal tersebut akan menuntut daerah untuk melakukan pembangunan yang masif. Peran pemerintah daerah adalah melakukan perencanaan yang matang untuk mencapai pembangunan yang dicita-citakan. Pembangunan dibagi menjadi jangka Panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka pendek (1 tahun). Hendaknya, pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas serta dana yang

dimiliki oleh daerah itu sendiri. Lebih lanjut lagi, dengan melakukan pembangunan melalui belanja daerah yang tepat hal tersebut akan membuat masyarakat semakin yakin bahwa kewajiban yang mereka berikan kepada daerah dialokasikan dengan baik dan tepat sasaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nabilah (2016) yang menyatakan bahwa PAD memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah, tetapi bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2017), bahwa PAD tidak memiliki pengaruh terhadap belanja daerah.

3.2.2 Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah (H_2)

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh untuk variabel DAU, didapat nilai t-tabel sebesar 1.98969/-1.98969 (lihat pada tabel statistik) dan t-hitung sebesar 2.502628. Karena nilai t-hitung > t-tabel ($2.502628 > 1.98969$) maka **H_2 diterima**. Nilai signifikan variabel DAU sebesar 0.0149 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0.05. Artinya DAU secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan maka akan meningkatkan belanja daerah.

Penerimaan DAU yang paling rendah terdapat pada Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2015, yaitu sebesar Rp131.033.381.000. Sedangkan penerimaan DAU yang paling tinggi pada Kota Palembang tahun 2019, yaitu sebesar Rp1.347.785.960.000. Pengaruh DAU yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan membuktikan bahwa, pemerintah daerah masih mengandalkan penerimaan DAU dalam membiayai belanja. Hal tersebut terjadi karena setiap kabupaten/kota memiliki kemampuan yang berbeda dalam memperoleh sumber pendapatan. Kekurangan pendapatan pada daerah inilah yang akhirnya ditutupi melalui pendapatan DAU. Sehingga pada akhirnya mengakibatkan pengalokasian DAU yang berperan banyak dalam membiayai belanja daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2017) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, tetapi bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nabilah (2016), bahwa DAU tidak memiliki pengaruh terhadap belanja daerah.

3.2.3 Pengaruh DAK terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh untuk variabel DAK, didapat nilai t-tabel sebesar 1.98969/-1.98969 (lihat pada tabel statistik) dan t-hitung sebesar -0.646463. Karena nilai t-hitung > t-tabel ($-0.646463 < 1.98969$) maka **H_3 ditolak**. Nilai signifikan variabel DAK sebesar 0.5203 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0.05. Artinya DAK secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap belanja daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa naik atau turunnya DAK tidak akan mempengaruhi belanja daerah.

DAK pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan relatif kecil yang menjadi faktor utama tidak berpengaruhnya DAK terhadap belanja daerah. Penerimaan DAK yang paling rendah terdapat pada Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2015, yaitu sebesar Rp1.977.700.000. Sedangkan pendapatan DAK yang paling tinggi pada Kota Palembang tahun 2019, yaitu sebesar Rp481.900.223.636. Hal tersebut terjadi karena pada praktiknya, DAK hanya digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional pada setiap kabupaten/kota guna mendorong percepatan pembangunan daerah. DAK diberikan sesuai dengan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah namun juga sejalan dengan prioritas nasional. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurdini (2015) yang menyatakan bahwa DAK memiliki pengaruh terhadap belanja daerah, tetapi bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Melda (2020) yang menyatakan bahwa DAK tidak memiliki pengaruh terhadap belanja daerah.

3.2.4 Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil uji F dapat diketahui F-hitung sebesar 63.74608 dan F-tabel sebesar 3.11. Karena nilai F-hitung $>$ F-tabel ($63.74608 > 3.11$) dan nilai signifikan sebesar 0.000000 ($0.000000 < 0.05$) maka **H₄ diterima**. Jadi dapat disimpulkan bahwa PAD, DAU, dan DAK secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh PAD, DAU, dan DAK dilihat dari hasil penelitian koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.949067. Artinya persentase sumbangan pengaruh variabel PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Daerah sebesar 94,9%, sedangkan sisanya sebesar 5,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Armawadin (2017), bahwa PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal tersebut dikarenakan pemerintah kabupaten/kota masih bergantung terhadap dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerah. Besarnya pembiayaan pengeluaran daerah masih didominasi oleh pemerintah pusat melalui dana transfer berupa DAU, DAK, dan DBH.

3.2.5 Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji F dapat diketahui F-hitung sebesar 72.13120 dan F-tabel sebesar 2.72. Karena nilai F-hitung $>$ F-tabel ($72.13120 > 2.72$) dan nilai signifikan sebesar 0.000000 ($0.000000 < 0.05$) maka **H₅ diterima**. Jadi dapat disimpulkan bahwa PAD, DAU, DAK, dan Belanja Daerah secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil penelitian koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.957521. Artinya persentase sumbangan pengaruh variabel PAD, DAU, dan Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 95,7%, sedangkan sisanya sebesar 4,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa besarnya belanja daerah masih didominasi oleh dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat berupa DAU dan DAK yang berdampak pada kemandirian keuangan daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih tingginya tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat dalam membiayai kebutuhan daerah. Tinggi rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah disebabkan oleh nilai PAD yang mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Dalam kasus ini, pemerintah daerah membutuhkan perhatian yang lebih serius untuk menganalisis dan kemudian mengambil langkah lanjut untuk mempertahankan bahkan meningkatkan PAD. Sehingga pada akhirnya akan meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah.

Laporan keuangan Kabupaten/Kota menunjukkan proporsi PAD hanya mampu membiayai pengeluaran pemerintah daerah paling tinggi sekitar 50%. Jika dilihat dari kemampuan keuangannya masih rendah dan termasuk dalam pola hubungan konsultatif, maka pemerintah pusat tidak bisa mengambil alih sepenuhnya namun cukup memberikan konsultasi saja. Konsultasi disini bermakna pemerintah daerah menanyakan atau berdiskusi persoalan pemerintahan daerahnya kepada pusat dan mengharapkan solusi ataupun masukan dan saran dari pemerintah pusat. Biasanya konsultasi dilakukan jika pemerintah daerah menghadapi permasalahan yang dianggap berat dan tidak mampu diselesaikan sendiri.

3.2.6 Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah

Berdasarkan hasil uji regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien PAD sebesar 0.192995 dan koefisien DAU sebesar 0.506505. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh PAD

terhadap Belanja Daerah lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan daerah diperlukan dana lain seperti DAU dan DAK yang menyebabkan terjadinya *flypaper effect*. Teori mengenai terjadi atau tidaknya *flypaper effect* dapat dilihat melalui perbandingan nilai koefisien PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah dan keduanya sama-sama signifikan atau PAD tidak signifikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan DAU sama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah yang membuktikan bahwa benar terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 2015-2019 yang bersumber dari DAU. Terjadinya *flypaper effect* ini berdampak pada tingkat kemandirian keuangan daerah, karena untuk memenuhi kebutuhan daerah masih memerlukan pendapatan lain yang berasal dari pemerintah pusat yaitu DAU, DAK, dan DBH yang akan menyebabkan pemerintah daerah memiliki ketergantungan kepada pemerintah pusat.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Armawaddin (2017), bahwa terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah yang bersumber dari DAU dan DBH atau Dana Bagi Hasil sedangkan DAK tidak terjadi *flypaper effect*. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nabilah (2016), bahwa tidak terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah. Tidak terjadinya *flypaper effect* pada belanja daerah disebabkan karena pemerintah daerah lebih mendominasi menggunakan PAD ketimbang DAU dalam membiayai kebutuhan daerah.

Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan memerlukan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan PAD. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD. Salah satu caranya adalah dengan menggali potensi daerah. Menggali potensi daerah diartikan sebagai pemerintah daerah harus dapat menganalisis apa saja faktor atau sektor yang dimiliki oleh daerahnya (unik) yang memiliki daya ekonomi. Setelah melakukan analisis, pemerintah daerah juga dituntut untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk merealisasikan cita-cita meningkatkan PAD. Melalui perencanaan yang matang, penganggaran yang tepat, dan eksekusi yang sesuai dengan perencanaan akan membantu efektivitas dan juga efisiensi dalam mencapai tujuan.

Selanjutnya, meningkatnya PAD berguna untuk mengatasi permasalahan agar tidak terjadinya *flypaper effect*. Mencegah timbulnya *flypaper effect* dilakukan agar dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah digunakan untuk mendorong sektor-sektor yang dapat meningkatkan investasi daerah. Jika suatu daerah memperoleh banyak investor, maka pembangunan akan berkembang dengan baik bahkan pesat. Umumnya, investor yang berinvestasi ada pada sektor infrastruktur. Contoh dari infrastruktur adalah jalan dan jembatan. Suatu daerah yang infrastrukturnya baik, maka berdampak pada lancarnya kegiatan perekonomian. Kegiatan perekonomian yang baik akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga pada akhirnya akan mensejahterakan masyarakat. Disisi lain, hal tersebut akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik, sehingga berdampak juga terhadap kontribusi PAD dalam menjalankan kehidupan daerah tersebut.

4. KESIMPULAN

PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan DAK tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. PAD, DAU, dan DAK secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. PAD, DAU, DAK, dan Belanja Daerah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Armawaddin, Muhamad, Aya Wali Rumbia, dan Muhamad Nur Afiat. 2017. "Analisis Flypaper Effect Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. Volume 18. Nomor 1. ISSN: 2406-9280.
- Ghozali, Imam dan Dwi Ratmono. 2017. *Analisis Multivariat dan Ekonometrika*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Melda, Helmi dan Efrizal Syofyan. 2020. "Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat". *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. Volume 2. Nomor 2. ISSN: 2656-3649.
- Mulya, Rahmatul dan Bustamam. 2016. "Pengaruh Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banda Aceh (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2008-2014)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. Volume 1. Nomor 2.
- Nabilah, Aisyah Najibah, Aris Soelistyo, dan Hendra Kusuma. 2016. "Analisis Flypaper effect PAD dan DAU Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2014". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Volume 12. Nomor 2. ISSN: 1693-2595.
- Nurdini, Rini, Adi Wiratno, dan Yusriati Nur Farida. "Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Volume 2. Nomor 1. Universitas Jenderal Soedirman.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- . 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tentang *Pemerintah Daerah*.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Edisi kedua. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni, Susanti Eka dan Indrian Supheni. "Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Periode 2012-2016". 2017. *Jurnal Akuntansi Dewanatara*. Volume 1. Nomor 2. ISSN: 2549-9637.
- Website Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang diakses melalui epid@bpk.go.id.